

**BASELINE KONDISI SOSIAL EKONOMI PEMBENTUKAN  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI TANJUNG LESUNG:  
ANALISIS DATA SENSUS PENDUDUK 2010**

**BASELINE OF SOCIAL ECONOMY CONDITION OF ESTABLISH  
SPECIAL ECONOMIC ZONE IN TANJUNG LESUNG: ANALYSIS OF  
CENSUS 2010 DATA**

**Rio Novandra**

Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, Jl. Gatot Subroto kav 10 Jakarta, Indonesia, 12710  
Rio.novandra@lipi.go.id

**Abstract**

*To spur the slowing down of Indonesia's economic growth, the government issued a package containing the VI Economic Policy Establishment of Special Economic Zones (SEZ). Judging from the experience of other countries, the SEZ has been shown to accelerate economic growth, increase GDP, absorb employment, and attract foreign direct investment (FDI). From the eight SEZ set in the Economic Policy Package VI, the formation of the tourist area of Tanjung Lesung very interesting to study as it was the first one in the tourism sector. Given the very large potential of Indonesia's tourism sector, the Tanjung Lesung SEZ will serve as a pilot model for the development of other SEZs. Additionally, Tanjung Lesung SEZ already set before other SEZs, since the issuance of the presidential decree No. 41 year 2012. Using data from the 2010 Population Census which was collected before Tanjung Lesung was set as SEZ, one can compare the conditions before and after the SEZ runs. This study makes a baseline to capture the socio-economic conditions by dividing the research variables into two groups; groups of population and infrastructure group. Then it will search the media to determine the condition of the latest developments. This study found that infrastructure and human resources are necessary to optimize SEZ Tanjung Lesung.*

**Keywords:** *Special Economic Zone, Tourism, Tanjung Lesung*

**JEL Classification:** H54, L83, P25

**Abstrak**

Dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang melambat, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi VI tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melihat dari pengalaman negara lain, KEK telah terbukti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, melalui penarikan investasi asing (FDI). Dari 8 KEK yang ditetapkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI, pembentukan kawasan wisata Tanjung Lesung sangat menarik untuk dikaji karena merupakan KEK pertama di sektor wisata. KEK Tanjung Lesung sudah ditetapkan terlebih dahulu dibandingkan KEK lain, dengan dikeluarkannya keputusan presiden No. 41 Tahun 2012. Mengingat potensi Indonesia untuk sektor pariwisata sangat besar untuk dikembangkan, maka KEK Tanjung Lesung akan dijadikan sebagai model percontohan untuk pengembangan KEK wisata lainnya. Dengan menggunakan Data Sensus Penduduk 2010, penelitian ini membuat *baseline* untuk menangkap kondisi sosial ekonomi sebelum pemberlakuan KEK. Studi ini melihat dua aspek secara spesifik yaitu kependudukan dan infrastruktur. Dengan studi ini dapat dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah KEK berjalan. Disamping menggunakan data sekunder, penelusuran media juga dilakukan untuk mengetahui kondisi perkembangan terakhir dari KEK Tanjung Lesung. Studi ini menemukan, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia agar kawasan pariwisata bisa lebih optimal.

**Kata Kunci:** Kawasan Ekonomi Khusus, Tanjung Lesung, Sosial Ekonomi

**Klasifikasi JEL:** H54, L83, P25

## PENDAHULUAN

Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), salah satunya Paket Kebijakan Ekonomi VI. PKE VI merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Perlambatan ekonomi ini diindikasikan oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pada akhir tahun 2014 bernilai 5,226.947 poin (KEMENKO, 21 Oktober 2015). Namun, selama tahun 2015, IHSG turun -12.13 % hingga 4,593.008 poin. Selanjutnya nilai tukar Rupiah (mata uang Indonesia) juga menunjukkan pelemahan. Di tahun 2014, nilai tukar Rupiah berada pada kisaran 12.502 per US\$, kemudian nilai tukar Rupiah melemah menjadi Rp 13.864 per US\$, bahkan nilai tukar sempat mencapai Rp 14.700 per US\$ di pertengahan tahun 2015. Selain itu, angka pengangguran pada tahun 2015 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 di bulan Agustus 2014 tingkat pengangguran terbuka sebesar sekitar 5,94%, kemudian meningkat sebesar 0,14% menjadi 6,18% di Agustus 2015.

Salah satu isi paket kebijakan ekonomi VI adalah membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) (Kemenko, 5 November 2015). KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian serta memperoleh fasilitas tertentu (Yesuari, 2010). Pembentukan KEK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi seperti investasi, kegiatan ekspor, dan perdagangan. Kegiatan tersebut diharapkan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menilik data empiris di Cina dan India (negara yang sukses dalam penerapan KEK), diketahui bahwa penerapan KEK mampu menarik investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja (Brautigam & Tang, 2011; White, 2011; Akici & James, 2008). Paket kebijakan China, seperti perlindungan hak kepemilikan pribadi, keringanan pajak, dan kebijakan penggunaan lahan sejak tahun 1978 telah berhasil meningkatkan investasi asing sebesar 58% (Wang, 2009). Hal ini merupakan dampak dari KEK yang memberikan kemudahan di bidang fiskal, dan juga di bidang non-fiskal

seperti birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan juga persoalan imigrasi, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan (Yesuari, 2010).

Dengan dibentuknya KEK diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tipologi wilayah, demografi, geoekonomi, dan geostrategik yang berbeda (Sekretariat Dewan Nasional KEK, 2014). Daerah dengan keindahan alam dapat dijadikan kawasan pariwisata. Sementara itu, daerah yang berada pada jalur perdagangan laut bisa dijadikan pusat perdagangan internasional. Selain itu, dengan dibentuknya KEK diharap mampu menarik FDI (Foreign Direct Investment). Dengan demikian, KEK akan mampu mengembangkan potensi ekonomi daerah, dan yang lebih penting dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kedua hal tersebut diharapkan akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Indonesia sudah menerapkan pola-pola kawasan ekonomi seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 1970 (Yesuari, 2010), dan masih terus berkembang dengan beberapa perubahan (lihat Tabel 1). Pemerintah Indonesia sudah melakukan pembentukan kawasan berikat di 7 lokasi, kawasan industri di 86 lokasi, kawasan pengembangan ekonomi terpadu di 13 lokasi, zona perdagangan bebas di 4 lokasi, dan 50 usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus (Kepres No. 8 tahun 2010).

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI ada 8 lokasi KEK yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu: Tanjung Lesung, Sei Mangkei, Palu, Bitung, Mandalika, Morotai, Tanjung Api-Api dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/ MBTK (Kemenko, 5 November 2015). Kawasan khusus ini dibuat untuk berbagai macam sektor unggulan, dan yang paling menarik perhatian adalah Kawasan Wisata. Literatur menunjukkan bahwa sektor pariwisata saat ini dapat menjadi penggerak perekonomian (*leading sector*) (Davenport, 2006; Henderson, 2008; Wang, 2009).

Tanjung Lesung adalah KEK pertama sektor pariwisata yang pernah ditetapkan di Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. KEK wisata

**Tabel 1.** Perkembangan Beberapa Kawasan Ekonomi dan Kawasan Khusus Lainnya di Indonesia

Bentuk Kawasan	Landasan Hukum	Definisi/tujuan
Kawasan Berikat (7 lokasi)	PP No. 33/ 1996 □ PP No.32/ 2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Industri (86 Lokasi)	Keppres No. 41/1996 □ PP No. 24 /2009	Kawasan pemusatan kegiatan industri (KI) yang dikelola oleh perusahaan KI
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (13 Lokasi)	PP No. 26/ 2007 Keppres Pembentukan Kapet	Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh, sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi yang besar
FTZ atau KPBPB (4 lokasi)	UU No.37/ 2000 PP No. 46, 47, 48 Tahun 2008	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebas dari bea masuk, PPN, PPNBM dan cukai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (50 pengusul)	UU No. 39/ 2009 Perpres No. 33/2010 Kepres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Sumber: Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013

Tanjung Lesung nantinya akan dijadikan sebagai contoh model KEK pariwisata yang akan terus dikembangkan di berbagai daerah untuk memaksimalkan potensi keindahan alam di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam situs resmi PT. Jababeka (2013):

*“Tanjung Lesung merupakan sebuah destinasi pariwisata yang terletak di Pandeglang, Banten. Tanjung Lesung memiliki keindahan dan kecantikan alam yang masih asli, dengan panjang garis pantai sepanjang 13 Km. Pantainya berpasir putih, berlaut biru kehijauan yang jernih, perairan yang tenang dengan terumbu karang yang mempesona. Langitnya biru cerah, udaranya pun segar dan bersih. Tak hanya alamnya, Tanjung Lesung pun memiliki keindahan budaya yang menarik. Tanjung Lesung adalah juga pintu gerbang menuju wisata Anak Krakatau dan Taman Nasional Ujung Kulon.”*

Kajian ini dimaksudkan untuk membangun data *baseline* di kecamatan Panimbang yaitu tempat KEK Tanjung Lesung berada. Informasi ini penting sebagai bahan dasar untuk pengambilan kebijakan di KEK Tanjung Lesung yang berada di kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang. Studi ini memanfaatkan data sensus penduduk 2010, dimana saat sensus dilaksanakan Tanjung Lesung belum ditetapkan sebagai KEK. Dengan adanya kajian ini maka dapat dibandingkan kondisi sosial ekonomi sebelum dan setelah KEK berjalan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Istilah ‘Kawasan Ekonomi Khusus’ memiliki arti yang cukup luas sebab dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis zona komersil. Istilah ini sudah cukup banyak dikenal sebagai iterasi modern dari zona komersil bebas, yang mana pertama kali berdiri pada tahun 1959 di Shannon, Irlandia. Berdasarkan klasifikasi dari World Bank, KEK dalam segala bentuknya terdiri atas, sedikitnya, area yang secara geografis

dibatasi dengan area kepabeanaan yang terpisah, dibawah oleh sebuah badan pengatur, dan di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang berlokasi di dalam kawasan (Akinci, 2008).

KEK mampu menarik investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja (Brautigam & Tang, 2011; White, 2011; Akici & James 2008). Kawasan khusus dibuat untuk berbagai macam sektor unggulan, yang dapat menjadi penggerak perekonomian (Davenport, 2006; Henderson, 2008; Wang, 2009).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*). Metode kuantitatif fokus dengan analisis statistik deskriptif. Dalam mendeskripsikan data, indikator perhitungan akan dibagi ke dalam 2 gugus. Pertama gugus

kependudukan, di dalamnya ada 5 indikator yang akan dilihat yaitu: jumlah penduduk berdasarkan wilayah, migrasi seumur hidup, status sekolah, pendidikan yang ditamatkan, lapangan usaha dan status pekerjaan utama. Gugus kedua akan melihat sisi infrastruktur dan perumahan yang mencakup tempat akhir pembuangan tinja, jenis telepon yang digunakan, akses internet, dan sumber penerangan utama. Metode kualitatif dilakukan dengan analisis pemberitaan baik melalui media cetak dan elektronik seputar Tanjung Lesung, terutama sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2015. Analisa konten ini dilakukan untuk melihat perkembangan KEK Tanjung Lesung setelah ditetapkan sebagai KEK dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar Tanjung Lesung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Wilayah



Sumber: Bapeda Pandeglang (data diolah)

**Gambar 1.** Lokasi Tanjung Lesung

Tanjung Lesung berada dalam teritori desa Tanjung Jaya yang termasuk dalam wilayah kecamatan Panimbang, kabupaten Pandeglang, provinsi Banten (Badan Pusat Statistik, 2016). Tanjung Lesung merupakan wilayah pesisir pantai barat pulau Jawa yang sudah terkenal dengan wisata pantainya seperti pantai Anyer, pantai Labuan, dan pantai Carita, dan sangat berpotensi untuk dikembangkan karena sebaran penduduk Indonesia terbanyak terpusat di bagian barat pulau Jawa dan provinsi Banten serta berada dekat dengan Ibu Kota Negara, DKI Jakarta (lihat Gambar 1). Selain itu, Tanjung Lesung berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pulau Sumatera, kemudian juga dari Tanjung Lesung bisa langsung melihat anak gunung Krakatau dan sangat dekat dengan taman nasional Ujung Kulon.

Berdasarkan data Sensus 2010 jumlah populasi penduduk di Provinsi Banten adalah sebanyak 10.632.166 jiwa. Wilayah Provinsi Banten terbagi atas 4 wilayah perkotaan dan 4 wilayah kabupaten. Kabupaten Pandeglang memiliki populasi terkecil dari 3 kabupaten lainnya. Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 2.834.376 jiwa, kemudian Kabupaten Serang sebanyak 1.402.818, lalu Kabupaten Lebak dengan 1.204.095 jiwa (Tabel 2). Jumlah penduduk

Kabupaten Pandeglang hanya 10,81% dari seluruh penduduk Provinsi Banten keseluruhan.

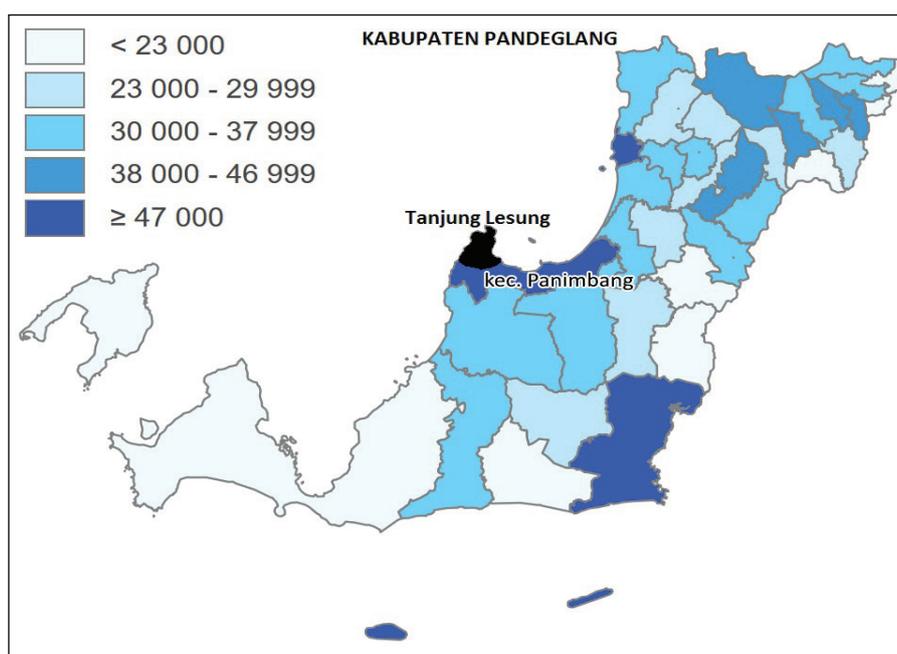
**Tabel 2.** Sebaran penduduk Provinsi Banten menurut Wilayah (Kabupaten/Kota)

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
Pandeglang	1,149,610
Lebak	1,204,095
Tangerang	2,834,376
Serang	1,402,818
Kota Tangerang	1,798,601
Kota Cilegon	374,559
Kota Serang	577,785
Kota Tangerang Selatan	1,290,322
Provinsi Banten	10,632,166

Sumber : BPS - Sensus Penduduk 2010 (data diolah)

Kawasan wisata pantai Provinsi Banten sendiri, hampir seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Panimbang. Kecamatan Panimbang berbatasan langsung dengan garis Pantai Carita dan Labuan, sedangkan Pantai Anyer termasuk kedalam wilayah Kabupaten Serang.

Di kabupaten Pandeglang terdapat 35 Kecamatan, dan Kecamatan Panimbang merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak dari 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang (lihat Gambar 2).



Sumber : BPS - Sensus Penduduk 2010 (data diolah)

**Gambar 2.** Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Pandeglang

Kecamatan Panimbang memiliki penduduk sebanyak 48.910 jiwa atau 4,25 % dari total penduduk Kabupaten Pandeglang yang berjumlah sebesar 1.149.610 jiwa, sedangkan kecamatan dengan populasi terbanyak adalah Kecamatan Labuan dengan 53.861 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Cikeusik sebanyak 51.012 jiwa (Tabel 3).

**Tabel 3.** Sebaran Penduduk Kabupaten Pandeglang

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Persentase terhadap kabupaten</b>
Labuan	53,861	4.68 %
Cikeusik	51,012	4.43 %
Panimbang	48,910	4.25 %
Kabupaten Pandeglang	<b>1,149,610</b>	100 %

*Sumber : BPS - Sensus Penduduk 2010 (data diolah)*

### **Baseline Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi awal sosial ekonomi Kecamatan Panimbang dibagi kedalam 2 gugus, pertama, gugus kependudukan dan gugus infrastruktur. Gugus kependudukan mengelompokkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi atau karakteristik warga Kecamatan Panimbang dan lapangan usaha, serta status perkerjaan.

Dari Tabel 4. bisa diidentifikasi bagaimana status migrasi warga Kecamatan Panimbang untuk melihat proporsi warga asli dan warga Panimbang.

Berdasarkan status migrasi, penduduk di Kecamatan Panimbang 88% adalah penduduk dengan status non-migran. Non-migran dapat juga diartikan sebagai penduduk asli. Sedangkan 12% sisanya adalah migran atau pendatang yang memutuskan menetap di Kecamatan Panimbang. Total pendatang di Kecamatan Panimbang adalah sebanyak 5.829 orang. Jumlah tersebut hanya 9.02% dari seluruh pendatang yang ada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 64.635 orang.

Jika melihat status sekolah dari warga Panimbang yang telah berumur 5 tahun keatas,

ada cukup banyak warganya yang tidak/belum pernah sekolah. Dari data Sensus Penduduk 2010 ada 6.848 orang di Panimbang yang belum pernah sekolah. Pada sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar semenjak tahun 2003. Bahkan untuk memastikan pendidikan Indonesia berjalan dengan baik pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau lebih dikenal dengan dana BOS. Dana BOS adalah program pemerintah untuk pendidikan sehingga memungkinkan anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk sekolah (sekolah gratis). Program pemberian dana BOS sudah dilakukan semenjak Juli 2005 (Kemendikbud, 2012). Dengan demikian, penting untuk terus mendorong anak usia sekolah agar dapat bersekolah.

Jumlah warga Panimbang yang masih bersekolah ada sebanyak 10.718, atau 4% dari seluruh warga kabupaten Pandeglang. Sementara itu, 26.061 warga kabupaten lain berstatus tidak bersekolah lagi. Status ini dapat diartikan sudah tamat dan tidak bekerja, dikeluarkan dari sekolah, atau juga bisa pernah sekolah. Dari sisi pendidikan, selain dari status sekolah, perlu juga dilihat tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Panimbang.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Panimbang bisa dikategorikan sangat rendah. Hanya 8,09% yang menamatkan sekolah SLTA keatas atau melebihi dari batasan program wajib belajar 9 tahun. Yang paling banyak adalah tamat SD dan tidak/belum tamat SD sejumlah 27.759 orang. Dari data sensus 2010 (Tabel 6), hanya 399 orang yang menamatkan pendidikan hingga tingkat universitas. Preferensi warga Kecamatan Panimbang lebih cenderung memilih masuk SLTA dibandingkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu 6.18% telah menamatkan pendidikan SLTA dan hanya 0,5% yang telah menamatkan pendidikan SMK.

**Tabel 4.** Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Migrasi Seumur Hidup

		Indikator	Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Status Migrasi	Non-Migran	21,918	3.97%	<b>551,452</b>
			Migran	3,159	8.40%	<b>37,604</b>
		Jumlah	25,077	4.26%	<b>589,056</b>	
	Status Migrasi	Non-Migran	21,163	3.97%	<b>533,523</b>	
			Migran	2,670	9.88%	<b>27,031</b>
		Jumlah	23,833	4.25%	<b>560,554</b>	
	Total	Status Migrasi	Non-Migran	43,081	3.97%	<b>1,084,975</b>
			Migran	5,829	9.02%	<b>64,635</b>
		Jumlah	48,910	4.25%	<b>1,149,610</b>	

Sumber : BPS - Sensus Penduduk 2010 (data diolah)

**Tabel 5.** Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Status Sekolah

		Indikator	Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Status Sekolah	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak	6,848	6.52%	104,974
		Masih sekolah	10,718	4.05%	264,709
	Tidak	Tidak	26,061	3.97%	657,080
		Tidak	30	3.01%	998
	Jumlah	43,657	4.25%	1,027,761	

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

**Tabel 6.** Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan	Panimbang	persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Tidak/Belum Pernah Sekolah	6,848	6.52%	<b>104,974</b>
Tidak/Belum Tamat SD	11,176	4.69%	<b>238,126</b>
SD/MI/ Sederajat	16,583	3.81%	<b>434,838</b>
SLTP/MTs/ Sederajat	5,518	3.91%	<b>141,214</b>
SLTA/MA/ Sederajat	2,694	3.40%	<b>79,330</b>
SM Kejuruan	223	3.63%	<b>6,147</b>
Diploma I/II	125	2.12%	<b>5,908</b>
Diploma III	91	2.94%	<b>3,097</b>
Diploma IV/ Universitas	367	2.78%	<b>13,199</b>
S2/S3	32	3.45%	<b>928</b>
<b>Jumlah</b>	<b>43,657</b>	<b>4.25%</b>	<b>1,027,761</b>

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

**Tabel 7.** Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha Utama

Lapangan Usaha	Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Pertanian Tanaman Padi dan Palawija	9,597	4.98%	192,771
Hortikultura	371	6.70%	5,535
Perkebunan	859	8.66%	9,915
Perikanan	1,587	15.84%	10,018
Peternakan	42	1.52%	2,767
Kehutanan	25	1.42%	1,761
Pertambangan dan Penggalian	11	0.63%	1,754
Industri Pengolahan	394	1.43%	27,585
Listrik dan Gas	29	2.33%	1,247
Konstruksi/ Bangunan	344	2.50%	13,766
Perdagangan	3,496	5.25%	66,569
Hotel dan Rumah Makan	383	5.00%	7,654
Transportasi dan Pergudangan	1,028	3.68%	27,916
Informasi dan Komunikasi	39	3.36%	1,161
Keuangan dan Asuransi	25	1.57%	1,588
Jasa Pendidikan	567	2.90%	19,577
Jasa Kesehatan	82	3.41%	2,405
Jasa Kemasyarakatan	947	2.77%	34,130
Lainnya	73	1.68%	4,343
<b>Jumlah</b>	<b>19,899</b>	<b>4.60%</b>	<b>432,462</b>

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

Berdasarkan lapangan usahanya, 48% warga Kecamatan Panimbang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija. Cukup menarik perhatian, Kecamatan Panimbang berbatasan langsung dengan garis pantai barat pulau Jawa. Namun data sensus memperlihatkan, hanya 8% tenaga kerja yang berprofesi sebagai nelayan atau 1.587 orang. Data sensus menunjukkan bahwa hanya 11 orang yang bekerja di sektor pertambangan, ini berarti Kecamatan Panimbang bukanlah kawasan yang punya potensi untuk pertambangan.

Dari pengelompokan pendapatan daerah, maka pendapatan sektor wisata diindikasikan oleh pendapatan dari hotel dan rumah makan. Kondisi Kecamatan Panimbang saat ini menunjukkan bahwa sektor wisata belum menjadi perhatian yang bisa menarik warga untuk bekerja pada sektor tersebut.

Status pekerjaan utama warga Kecamatan Panimbang masih berorientasi pada relasi

kekeluargaan, misalkan sebanyak 4.903 warga bekerja dibantu oleh buruh tidak dibayar, dan 4.327 adalah pekerja keluarga. Banyak juga warga Panimbang yang memiliki kecenderungan untuk bekerja sendiri serta sebagian kecil di antaranya berprofesi sebagai buruh tidak tetap dan buruh tidak dibayar. Selain itu, profesi buruh atau karyawan juga menempati persentase yang tidak terlalu besar yakni hanya sekitar 2.657 orang. Data ini menunjukkan bahwa persentase warga Kecamatan Panimbang yang bekerja di sektor informal lebih besar daripada di sektor formal atau hanya 17% yang bekerja di sektor formal.

Kondisi infrastruktur sangat penting dalam menopang mobilitas penduduk dan sosial ekonomi. Kegiatan sosial dan ekonomi tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan data BPS, dari hasil sensus 2010, ada beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian, di antaranya tempat akhir pembuangan tinja (Tabel 9).

**Tabel 8.** Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Berusaha sendiri	3.572	3,19%	111.925
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar	4.903	6,17%	79.407
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar	824	5,58%	14.767
Buruh atau karyawan	2.657	3,52%	75.491
Pekerja bebas	3.616	4,45%	81.318
Pekerja keluarga	4.327	6,22%	69.554
Jumlah	19.899	4,60%	432.462

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

**Tabel 9.** Jumlah Rumah dan Apartemen Menurut Tempat Akhir Pembuangan Tinja

Jenis Pembuangan Akhir Tinja	Panimbang	Persentase terhadap Kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Tangki septik	4.508	4,43%	101.799
Tanpa tangki septik	421	1,75%	23.989
Tidak punya	657	4,35%	15.090
Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar	6.672	5,05%	132.034
Jumlah	12.258	4,49%	272.912

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

Hal yang menarik dari data di atas, ternyata masih banyak rumah dan apartemen yang belum memiliki tempat akhir pembuangan tinja. Faktanya, ada lebih dari separuh atau tepatnya 54.4% rumah dan apartemen di Kecamatan Panimbang yang tidak memiliki tempat akhir pembuangan tinja. Sementara itu, rumah dan apartemen yang memiliki fasilitas pembuangan

hanya 40%. Dari jumlah persentase tersebut ada 421 rumah dan apartemen yang memiliki fasilitas pembuangan tinja, namun tidak memiliki tangki septik. Hanya 4.508 rumah dan apartemen yang memiliki fasilitas pembuangan akhir tinja dengan tangka septik.

Aspek infrastruktur lain yang disebutkan dalam data sensus 2010 adalah jenis telepon yang dimiliki (Tabel 11.).

**Tabel 10.** Jumlah Rumah dan Apartemen Menurut dan Jenis Telepon yang Dimiliki

Jenis Telepon yang Dimiliki	Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Kabel	24	2,92%	822
Seluler	7.447	4,96%	150.030
Kabel dan seluler	155	3,04%	5.096
Tidak punya	4.632	3,96%	116.964
Jumlah	12.258	4,49%	272.912

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

Pemanfaatan telepon sebagai sarana komunikasi di Kecamatan Panimbang didominasi oleh telepon seluler, dengan pengguna sebanyak 7.447 rumah dan apartemen. Pengguna telepon kabel jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 24 rumah dan apartemen. Selain itu, 155 rumah dan apartemen memanfaatkan telepon kabel dan seluler sebagai alat komunikasi.

Meskipun perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat, masih ada 4.632

rumah dan apartemen yang tidak memiliki alat komunikasi. Secara umum, ini mengindikasikan kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Panimbang terhadap kemajuan teknologi dan komunikasi.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dan komunikasi diperkuat dengan data yang akses internet dalam tiga bulan terakhir (Tabel 11).

**Tabel 11.** Jumlah Rumah dan Apartemen Menurut Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir

Akses Internet			
	Ya	Tidak	Jumlah
Panimbang	855	11.403	12.258
Persentase terhadap kabupaten		4,48%	4,49%
Kabupaten Pandeglang		254.386	272.912

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

Akses internet dalam tiga bulan terakhir hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Terbukti, dari total 12.258 rumah dan apartemen yang ada di Kecamatan Panimbang, hanya 855 rumah yang memiliki akses internet atau 6,9%. Pada tingkat kabupaten persentase akses internet di Kecamatan Panimbang terlihat sangat rendah, yakni hanya 4,62%.

Infrastruktur yang sangat vital dari paparan data sensus 2010 adalah sumber penerangan utama. Dari data tersebut juga bisa dilihat kondisi kelistrikan Kecamatan Panimbang. Daerah dengan rasio elektrifikasi yang tinggi cenderung lebih mudah untuk berkembang dibandingkan dengan daerah dengan rasio elektrifikasi yang rendah. Mudahnya akses terhadap listrik dapat mendorong perekonomian dan pembangunan dengan lebih cepat. Dalam tabel 12 tergambar bagaimana sumber penerangan utama tempat tinggal masyarakat di Kecamatan Panimbang.

Ternyata di Kecamatan Panimbang, rasio elektrifikasinya sudah baik. Dari total 12.258 rumah dan apartemen yang ada, 11.481 sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Artinya rasio elektrifikasi di Kecamatan Panimbang sudah 94%. Meskipun jika dilihat lebih jauh lagi masih ada 165 rumah dan apartemen yang tidak menggunakan jaringan PLN *off-grid*. Kemudian dari 11.316 rumah dan apartemen yang telah menggunakan listrik dari PLN, masih ada 3.735 rumah yang tidak menggunakan meteran, yang berarti masih menyambung kepada tetangga untuk mendapatkan listrik. Meskipun rasio elektrifikasi kecamatan sudah baik, masih ada 777 rumah dan apartemen yang sumber utama penerangannya bukan dari listrik.

Dari deskripsi beberapa indikator di atas, bisa dilihat gambaran umum kondisi sosial ekonomi. Gugus kependudukan menunjukkan bahwa warga Panimbang kebanyakan adalah warga asli dan bukan migran dari daerah lain. Kemudian tingkat pendidikan warganya masih tergolong rendah. Meskipun Kecamatan Panimbang adalah wilayah pantai yang umumnya didominasi oleh sektor perikanan, namun senyatanya lapangan usaha terbanyak adalah di sektor pertanian padi dan hortikultura. Status pekerjaan utama warga Panimbang masih berorientasi asas kekeluargaan, dimana banyak pekerja dari keluarga, dan buruh tidak tetap dan tidak dibayar.

**Tabel 12.** Jumlah Rumah dan Apartemen Menurut Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal

Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal	Kecamatan Panimbang	Persentase terhadap kabupaten	Kabupaten Pandeglang
Listrik PLN meteran	7.581	42,14%	179.887
Listrik PLN tanpa meteran	3.735	49,78%	75.036
Listrik Non-PLN	165	55,40%	2.978
Bukan listrik	777	51,76%	15.011
Jumlah	12.258	44,91%	272.912

Sumber : BPS, 2010 (data diolah)

Gugus infrastruktur menggambarkan masih perlu ada perbaikan, terutama tempat pembuangan akhir tinja. Untuk kondisi komunikasi sudah cukup baik, namun akses internet harus ada peningkatan. Di sektor kelistrikan, secara rasio elektrifikasi sudah baik, namun belum bisa dipastikan bagaimana kualitas kelistrikan di Kecamatan Panimbang.

## Penelusuran Media

Sesuai dengan rencana Presiden, bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim, pembangunan Pelabuhan Marina Tanjung Lesung menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Banten dalam menggapai dunia internasional (Kompas, 2015). Tanjung Lesung sebagai kawasan wisata akan menonjolkan seni dan budaya khas Banten (Suara Merdeka, 2015). KEK Tanjung Lesung bisa jadi percontohan untuk daerah lain khususnya dalam pengembangan sektor wisata. Tanjung Lesung punya potensi besar dan mampu bersaing dengan negara lain (Republika, 2015). Sebelum ditetapkannya kebijakan pembentukan KEK Tanjung Lesung, pemerintah telah terlebih dahulu melakukan Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS), dan Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk mendukung infrastruktur di Tanjung Lesung (Kompas, 2015). Kawasan Tanjung Lesung sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur. Infrastruktur yang belum memadai jadi penghambat perkembangan Tanjung Lesung (Bisnis, 2015). Perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Tanjung Lesung mendapat perhatian khusus dari Presiden Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo mengunjungi langsung KEK Tanjung Lesung untuk melihat perkembangan daerah wisata Indonesia (MetroNews, 2015).

PT. Jababeka selaku pengusul KEK Tanjung Lesung mempercepat proyek pengembangan Tanjung Lesung dalam beberapa tahapan (Jababeka, 2015). KEK Tanjung Lesung telah berhasil menarik investor asing, salah satunya dari Timur Tengah, untuk pengembangan kawasan wisata dan pembangunan *resort*.

PT. Telkom sebagai salah satu BUMN besar di Indonesia telah menandatangani MoU (*memorandum of understanding*) dalam pengembangan infrastruktur ICT di Tanjung

Lesung (IndiHome, 2015). Pada September 2015 Pemerintah Banten telah memulai percepatan pembangunan jalan tol Serang – Panimbang. Program percepatan dimulai dari pembuatan AMDAL, penetapan lokasi, pembebasan lahan, dan lelang konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan Pendanaan dari APBN (TEMPO, 2015). Saat ini pemerintah daerah dan Kementerian PUPR dan perhubungan sedang mngesahkan percepatan pembangunan infrastruktur Tanjung Lesung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian dengan membangun KEK yang dapat memaksimalkan potensi geografis Indonesia. Pembangunan KEK Tanjung Lesung sebagai model KEK berbasis wisata diharapkan mampu untuk menarik investasi dan menambah sumber cadangan devisa negara.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar KEK Tanjung Lesung lebih optimal. Infrastruktur pariwisata dan infrastruktur pendukung harus lebih baik.

Di Tanjung Lesung sumber daya manusia (SDM) untuk penguatan/ pengembangan sektor pariwisata masih kurang. Kemudian, budaya masyarakat masih bertani agraris dan tradisional, seharusnya budaya maritim dan agrowisata bisa lebih diperkuat, mengingat Tanjung Lesung dan Kecamatan Panimbang berada disepanjang Garis pantai barat Pulau Jawa.

Infrastruktur untuk kehidupan yang sehat masih belum memadai. Selain itu, keberadaan dan akses infrastruktur ICT & listrik masih belum dapat memenuhi kelayakan yang diharapkan.

Melihat arah pengembangan KEK Tanjung Lesung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, maka sangat dimungkinkan adanya peningkatan investasi dan infrastruktur jalan dan ICT.

Dengan demikian maka, pemerintah perlu membangun sekolah kejuruan untuk bidang wisata sehingga tersedia sumber daya manusia yang punya kemampuan dalam...(dan seterusnya) Pemerintah perlu membangun sekolah kejuruan untuk bidang wisata sehingga tersedia sumber

daya manusia yang punya kemampuan dalam mengelola pariwisata, serta perlu digalakkan konsep agro-wisata yang dapat mendukung pariwisata dengan tetap menjaga potensi agraria.

Dari segi kajian sendiri perlu dilakukan *indepth interview* untuk mendalami perubahan variabel yang diamati. Dapat dicari daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Tanjung Lesung namun tidak masuk dalam kawasan KEK untuk melihat dampak perubahan dari dibentuknya KEK itu sendiri, sehingga dapat dilihat dampak dari pembentukan KEK yang lebih objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akinci, Gokhan (2008). *Special Economic Zones : Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development*. The World Bank. Washington, DC.
- Alexander, H. B. (2015, December 16). KEK Tanjung Lesung Dilirik Investor Timur Tengah. *KOMPAS*. Retrieved April 3, 2015, from <http://properti.kompas.com/read/2015/12/16/180000821/KEK.Tanjung.Lesung.Dilirik.Investor.Timur.Tengah>
- Banten Mulai Garap Jalan Tol Serang-Panimbang. (2015, September 10). *TEMPO*. Retrieved April 3, 2016, from <https://m.tempo.co/read/news/2015/09/10/090699336/banten-mulai-garap-jalan-tol-serang-panimbang>
- Festiani, S. (2015, February 24). KEK Tanjung Lesung Jadi Percontohan Daerah Lain. *REPUBLIKA*. Retrieved April 3, 2016, from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/23/nk85dh-kek-tanjung-lesung-jadi-percontohan-daerah-lain>
- Hariyanti, D. (2015, December 23). Ini Dia Catatan Miring Untuk KEK Tanjung Lesung. *Bisnis*. Retrieved April 3, 2015, from <http://industri.bisnis.com/read/20151223/45/504593/ini-dia-catatan-miring-untuk-kek-tanjung-lesung>
- Kemendikbud. (2012). PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2012. Retrieved April 03, 2016, from <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>
- KEMENKO, H. (2015, November 5). Paket Kebijakan Ekonomi VI: Menggerakkan Ekonomi di Wilayah Pinggiran, Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan, dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat. Retrieved December 28, 2015, from <https://www.ekon.go.id/ekliping/view/siaran-pers-paket-kebijakan.1798.html> Siaran pers
- KEMENKO, H. (2015, October 21). 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Paket Kebijakan Ekonomi, Bangkitkan Kepercayaan Pasar. Retrieved December 28, 2015, from <https://www.ekon.go.id/berita/view/1-tahun-pemerintahan.1775.html> Siaran Pers
- Perkasa, S. (2016, February 15). Setelah Jokowi Melirik Tanjung Lesung. *MetroNews*. Retrieved April 3, 2016, from <http://telusur.metrotvnews.com/read/2016/02/15/484681/setelah-jokowi-melirik-tanjung-lesung>
- Prodjo, W. A. (2015, March 16). Tanjung Lesung Akan Miliki Marina Terbesar Se-Asia Tenggara. *KOMPAS*. Retrieved March 3, 2016, from <http://travel.kompas.com/read/2015/03/16/163900527/Tanjung.Lesung.Akan.Miliki.Marina.Terbesar.Se-Asia.Tenggara>
- PT. Jababeka. (2013, October 23). Retrieved January 9, 2016, from <http://www.jababeka.com/pt-banten-west-java-tourism-development-luncurkan-beranda-villa>
- Rahmawanto, E. (2016, February 14). Percepat Infrastruktur Tanjung Lesung. *Mediaindonesia*. Retrieved March 3, 2016, from <http://www.mediaindonesia.com/news/read/28783/percepat-infrastruktur-tanjung-lesung/2016-02-14>
- Ramadhiani, A. (2015, November 8). Pemerintah Gelar Studi Kelayakan Infrastruktur Tanjung Lesung. *KOMPAS*. Retrieved March 3, 2016, from <http://properti.kompas.com/read/2015/11/08/133439221/Pemerintah.Gelar.Studi.Kelayakan.Infrastruktur.Tanjung.Lesung>
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2014). *Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajianpenyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kawasan Ekonomi*

- Khusus* (Rep.). Bandung: CV. TORCHE INDONESIA. Laporan Pendahuluan Telkom Tangani Infrastruktur ICT Tanjung Lesung Digital World. (2015, February 24). *IndiHome*. Retrieved April 3, 2016, from <http://www.indihome.co.id/article/detail/telkom-tangani-infrastruktur-ict-tanjung-lesung-digital-world> - siaran pers
- Wang, Jici. John H. Braadbury (2016). The Changing Industrial Geography of The Chinese Special Economic Zones. *Economic Geography*, Vol. 62, No. 4. Clark University. <http://www.jstor.org/stable/143827>
- Wang, Jin (2009). The Economic Impact of Special Economic Zones : Evidence from Chinese Municipalities. Job Market Paper
- Yesuari, A. P. (2010, May/June). Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus. *Tata Ruang*. Retrieved January 11, 2016, from [http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=\\_fullart&idart=254](http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=254)